

**PENGARUH PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI KOMPARASI KABUPATEN MALANG DAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2004-2013)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Basofi Setiawan

125020101111058



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PENGARUH PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH
(STUDI KOMPARASI KABUPATEN MALANG DAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2004-2014)**

Yang disusun oleh :

Nama : Basofi Setiawan
NIM : 125020100111058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juli 2016

Malang, 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing,



Shofwan, SE., M.Si

NIP. 19730517 200312 1 002

**PENGARUH PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH
(STUDI KOMPARASI KABUPATEN MALANG DAN KABUPATEN JEMBER TAHUN
2004-2013)**

**Oleh:
Basofi Setiawan**

**Dosen Pembimbing:
Shofwan, SE., M.Si.**

ABSTRAK

Pengeluaran sektor publik adalah pengeluaran yang paling dasar dan selalu menjadi prioritas utama pemerintah, di mana pengeluaran tersebut terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pengeluaran tersebut diharapkan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember adalah dua kabupaten yang memiliki anggaran pengeluaran sektor publik yang hampir sama besar. Pengeluaran sektor publik di Kabupaten Jember sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Malang. Tetapi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Malang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jember. Kondisi ini yang membuat tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana hasil komparasi dari pengeluaran tersebut di kedua kabupaten. Berdasarkan uji regresi linier berganda pada Kabupaten Malang, pengeluaran publik yang berpengaruh positif tidak signifikan adalah pengeluaran pendidikan dan infrastruktur dan pengeluaran kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada hasil penelitian di Kabupaten Jember, pengeluaran pendidikan berpengaruh positif signifikan dan pada pengeluaran kesehatan dan infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran publik yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang adalah pengeluaran sektor kesehatan sedangkan pengeluaran sektor publik yang paling optimal dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember adalah pengeluaran pendidikan ..

Kata kunci: Pengeluaran Sektor Publik, Pengeluaran Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meminimalisir ketimpangan pendapatan pada masyarakat suatu daerah. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, mengalami naik turunnya pertumbuhan ekonomi karena pengaruh perekonomian global yang sedang mengalami kemerosotan atau bisa disebut sebagai krisis ekonomi. Merosotnya perekonomian negara-negara besar seperti Amerika dan China menyebabkan harga-harga barang di pasar melonjak sehingga menyebabkan nilai mata uang yang semakin melemah membuat perekonomian Indonesia terpengaruh. Dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2013 yang mengalami penurunan karena tingkat inflasi yang cukup tinggi.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia tahun 2010-2013

Tahun	2010	2011	2012	2013
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	6,14%	6,35%	6,28%	5,90%
<i>Tingkat Inflasi</i>	6,04%	4,29%	4,18%	7,12%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 (Diolah)

Pulau Jawa merupakan penyumbang perekonomian yang paling tinggi di Indonesia. Bila dilihat proporsi penyumbang *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) per pulau yang ada di Indonesia

pada tahun 2013, pulau Jawa menyumbang sebesar 58,15 persen kemudian diikuti oleh pulau Sumatra sebesar 23,90 persen, Pulau Kalimantan 8,73 persen, pulau Sulawesi 4,81 persen, dan sisanya 4,41 persen pada pulau-pulau lain. Pertumbuhan tersebut didorong dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 1,50 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat 30,78 persen, Pembentuk Modal Tetap Bruto sebesar 5,17 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,72 persen, serta Impor Barang dan Jasa sebesar 10,03 persen (*kemenkeu.go.id*)

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2010-2013 (persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
DKI Jakarta	6,50	6,73	6,53	6,11	6,47
Jawa Barat	6,20	6,51	6,28	6,06	6,26
Jawa Tengah	5,84	6,03	6,34	5,81	6,01
DI Jogjakarta	4,88	5,17	5,32	5,40	5,19
Jawa Timur	6,68	7,22	7,27	6,55	5,19
Banten	6,11	6,38	6,15	5,86	6,13

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Malang, 2015

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2010 – 2013. Dalam 4 tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur selalu menjadi provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibanding provinsi lain. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir sebesar 6,93 persen disusul DKI Jakarta sebesar 6,47 persen dan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,26 persen. Kontribusi perekonomian di Jawa Timur tidak lepas dari sumbangan ekonomi dari tiap Kabupaten/Kota yang terdapat dalam provinsi tersebut. Dalam sumbangan PDRB, kota Surabaya yang memiliki sumbangan terbesar terhadap Jawa Timur. Pada tahun 2012 kota Surabaya mampu menghasilkan PDRB sebesar 101,671.63 milyar sedangkan daerah lain masih dibawah 30 Milyar. Hal ini dikarenakan kota Surabaya adalah kota pusat di Jawa Timur yang memiliki banyak industri sehingga dapat mampu menciptakan iklim ekonomi yang tinggi. Kemudian disusul Kota Kediri, Kabupaten Gersik, dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki PDRB diatas 20 Milyar. Ketiga daerah tersebut juga daerah perindustrian sehingga dapat menciptakan tingkat PDRB yang cukup tinggi pula.

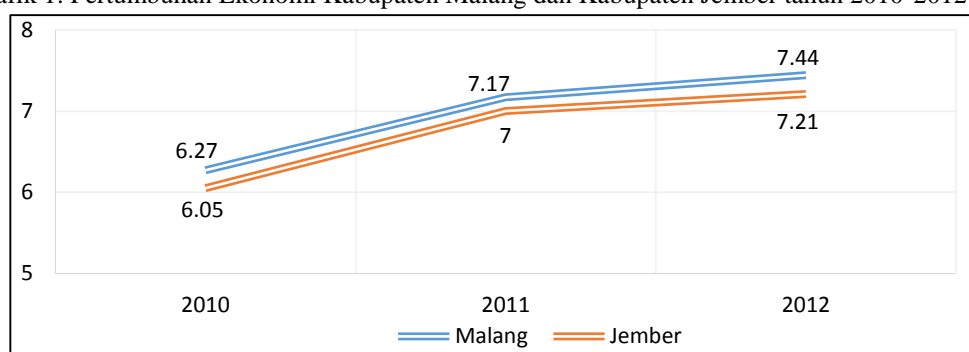
Tabel 3. Peringkat 8 Besar Kab/Kota yang memiliki PDRB tertinggi di Jawa Timur tahun 2010-2012 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kab/Kota	2010	2011	2012
1	Kota Surabaya	87,828.84	94,471.05	101,671.63
2	Kab. Sidoarjo	26,161.61	27,966.21	29,958.88
3	Kota Kediri	21,967.34	23,710.20	25,490.23
4	Kab. Gersik	16,837.44	18,081.04	19,424.16
5	Kab. Malang	14,578.97	15,624.10	16,786.42
6	Kota Malang	14,044.63	15,038.46	16,176.98
7	Kab. Jember	11,550.55	12,359.52	13,250.98
8	Kab. Banyuwangi	11,015.20	11,788.65	12,638.53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Pada tabel 1.3 secara umum 4 besar kabupaten/kota penyumbang PDRB terbesar di Jawa timur adalah daerah yang berfokus pada perindustrian dan memiliki industri-industri besar yang mampu menyokong perekonomian di daerahnya. Tetapi pada perekonomian Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember lebih ditunjang oleh sektor pertanian. Kabupaten Malang sendiri menempati urutan 5 sebagai penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur dengan PDRB sebesar 16,176.98 sedangkan Kabupaten Jember memiliki PDRB sebesar 13,250.98 Milyar dan menempati urutan ke 7.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember tahun 2010-2012



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah)

Dalam grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember pada rentang tahun 2010 sampai 2012 tampak pertumbuhan ekonomi kedua kabupaten memiliki pertumbuhan ekonomi yang hampir sama besar, hanya saja Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan ekonomi sedikit diatas Kabupaten Jember. Pada tahun 2010 Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% sedangkan Kabupaten Jember sebesar 6,05% dan pada tahun 2012 pertumbuhan Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,44% sedangkan Kabupaten Jember sebesar 7,21%.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga dan mengatur perekonomian. Intervensi pemerintah didalam perekonomian adalah untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, serta melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya khususnya sektor swasta dan sektor rumah tangga. Oleh karena itu campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini menyediakan barang publik, dan juga menjadi penyeimbang untuk pemerataan perekonomian. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah objek yang selalu menarik untuk dianalisis. Kontroversi utama adalah apakah sektor publik (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dalam periode jangka panjang akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara umum pengeluaran sektor publik adalah pengeluaran sektor yang paling dasar dan selalu menjadi prioritas utama.

Hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kapasitas produksi tenaga manusia yang dikenal dengan proses *human investment* melalui peningkatan ilmu pengetahuan, skill, dan teknologi. Ketiga variabel ini disebut dengan *human capital* yang dapat meningkatkan output suatu negara. Untuk hubungan pengeluaran kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja dalam kondisi sehat maka output yang dihasilkan akan meningkat dan akan mempengaruhi kemajuan perekonomian suatu daerah. Kemudian hubungan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan pada suatu daerah atau negara. Semakin besar pembangunan ekonomi maka akan semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan.

Tabel 4. Pengeluaran sektor publik Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember tahun 2010-2013

Pengeluaran	Tahun	Kab. Malang	Kab. Jember
Pendidikan	2010	549,417,667,000	552,401,369,740
	2011	810,867,196,300	907,559,006,595
	2012	752,250,463,938	1,050,270,337,356
Kesehatan	2010	120,374,574,000	167,924,097,738
	2011	153,130,890,523	204,949,172,414
	2012	170,324,145,617	227,944,488,228
Infrastruktur	2010	182,351,743,000	111,871,924,311
	2011	197,846,906,200	164,132,546,949
	2012	326,421,521,221	228,637,234,764

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016 (diolah)

Pada tabel 1.4 walaupun Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember dalam pengeluaran sektor publik hampir memiliki jumlah yang sama akan tetapi Kabupaten Jember masih sedikit diatas Kabupaten Malang dalam periode tahun 2010 – 2012. Kabupaten Jember pada pengeluaran pendidikan tahun 2012 sebesar 1 triliun sedangkan Kabupaten Malang sebesar 752 Milyar. Di pengeluaran kesehatan Kabupaten Jember kembali unggul dengan pengeluaran di tahun 2012 sebesar 227 Milyar sedangkan Kabupaten Malang sebesar 170 Milyar. Kabupaten Malang melakukan pengeluaran yang cukup besar pada sektor infrastruktur yang dimana pada tahun 2012 mencapai angka 326 Milyar sedangkan Kabupaten Jember sendiri hanya sebesar 228 Milyar.

Persamaan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember tidak hanya dilihat pada PDRB dan pengeluaran publik saja tetapi banyak aspek lain pada kedua kabupaten tersebut yang memiliki kesamaan sehingga dapat dilakukan uji secara komparasi. Pertama, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember memiliki luas daerah kurang lebih sama besar, Kabupaten Malang memiliki luas wilayah seluas 3.530,65 km² sedangkan Kabupaten Jember memiliki luas wilayah seluas 3.293,34 km². Kedua, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember memiliki kepadatan penduduk yang tidak jauh berbeda. Pada tahun 2013, Kabupaten Malang memiliki kepadatan penduduk sebesar 692,85/km² sedangkan Kabupaten Jember sebesar 708,32/km². Ketiga, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember memiliki sumber perekonomian utama yang sama yaitu pada sektor pertanian. Kabupaten Malang menghasilkan produk pertanian, perkebunan, dan peternakan, sedangkan Kabupaten Jember menghasilkan produk utama pada sektor pertanian yaitu cengkeh (BPS, 2013).

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Pembangunan

Pembangunan memiliki pengertian yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pembangunan berasal dari kata bangun dan secara harfiah diartikan antara lain sama bentuk, struktur atau susunan yang merupakan suatu wujud, rupa dan perawakan. Secara kiasan dapat diartikan sebagai memperbaiki sesuatu yang telah ada untuk dibuat menjadi lebih baik sehingga lebih berguna atau lebih bermanfaat (Nasution, 2000). Pembangunan sering dianggap sebagai pembangunan yang bersifat fisik seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya pembangunan tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan bersifat non fisik, seperti keadilan, kecerdasan, kenyamanan dan lain-lain (Nasution, 1994).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Model pertumbuhan ekonomi dari Solow-Swan adalah pengembangan model dari Harrod-Domar. Model ini menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi dalam persamaan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Menurut model ini, pertumbuhan output diperoleh dari satu atau lebih dari tiga faktor: Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan), peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi), dan kemajuan teknologi.

Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah adalah sebuah sistem regulator dalam suatu daerah maupun negara. Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu (Mangkoesoebroto, 1991) : 1.) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, 2.) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan, 3.) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu (Mangkoesoebroto, 1991) : Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi.

Perkembangan Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (1991) menyatakan bahwa teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

Model Pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada Hukum Wagner menjelaskan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada teori pengeluaran pemerintah mikro menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan dilaksanakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain, Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan akan membuat gedung pemerintahan.

Hubungan Antara Pengeluaran Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi (Todaro, 2006). Dengan pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mendorong perekonomian suatu daerah ataupun negara. Kualitas hidup masyarakat pun akan meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

Hubungan Antara Pengeluaran Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan gizi dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Oleh sebab itu investasi yang dilakukan untuk perbaikan gizi dan kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu aspek *human capital* (Payaman, 2001). Pengalaman menunjukkan bahwa perbaikan tingkat hidup ternyata menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas ini kemudian meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang selanjutnya meningkatkan tingkat hidupnya. Yang sering dianggap sebagai lingkaran setan adalah produktivitas kerja rendah dan penghasilan rendah. Sebaliknya penghasilan rendah karena produktivitas kerja rendah. Implikasi dari penerapan teori *human capital* di bidang perbaikan gizi dan kesehatan adalah perlunya usaha-usaha memerangi kemiskinan. Banyaknya hal yang dapat dilakukan dalam rangka memerangi kemiskinan ini baik dalam skala internasional, nasional, maupun di tingkat perusahaan itu sendiri.

Hubungan Antara Pengeluaran Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan percepatan pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang akan dijalankan, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat. Infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis dalam mendukung perkembangan sosial, ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan pra syarat masuknya investasi ke suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah akan menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah. Disparitas pembangunan antara wilayah dapat dihilangkan apabila akses sarana dan pra sarana infrastruktur jalan dapat tersedia secara layak dan berkualitas (Tisniwati, 2012)

C.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember pada tahun 2004-2013. Dalam penelitian ini menggunakan model ekonometri *Ordinary Least Square* (OLS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dalam bentuk *time series*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan menggabungkan data sekunder dari data APBD, DJPK dan BPS. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan

ekonomi. Variabel independen adalah anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan anggaran infrastruktur pada kedua kabupaten.

Dengan spesifikasi model ekonometrika:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana: Y = Pertumbuhan ekonomi, X_1 = Anggaran Pendidikan, X_2 = Anggaran Kesehatan, X_3 = Anggaran Infrastruktur, β_0 = Konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi, dan e = term error (kesalahan pengganggu)

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan dalam penelitian ini dilakukan pengujian per Kabupaten. Pada pengujian Asumsi Klasik yaitu asumsi autokorelasi, asumsi multikolinieritas, asumsi heterokedastisitas, dan asumsi normalitas, maka model penelitian dikatakan BLUE. Berdasarkan uji autokorelasi setelah perbaikan dengan menggunakan *The Cochrane-Orcutt two-step Procedure* menunjukkan bahwa diantara variabel yang digunakan tidak mempunyai korelasi antar kurun waktu. Hasil uji multikolinearitas juga menunjukkan keseluruhan variabel independen yang digunakan tidak mempunyai korelasi satu sama lain. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa data yang digunakan telah sama/homokedastisitas. Kemudian uji normalitas juga memiliki sebaran yang normal untuk kedua Kabupaten yang diteliti.

Setelah lolos dari uji asumsi klasik, maka tahapan selanjutnya adalah uji statistik. Uji statistik berfungsi untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial (individual) maupun simultan (bersama-sama).

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, diketahui bahwa model yang digunakan mempunyai nilai koefisien determinasi (R^2) masing-masing kabupaten, pada kabupaten Malang sebesar 98.0417 persen dalam menjelaskan variabel dependen dan pada kabupaten Jember sebesar 98.2880 persen dalam menjelaskan variabel dependen. Kemudian dilakukan uji simultan dan uji parsial kepada ketiga variabel independen yang digunakan. Dalam uji simultan, didapatkan hasil bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen pada masing-masing kabupaten yang diteliti.

Pembahasan Terhadap Kabupaten Malang

Tabel 5. Hasil Regresi Kabupaten Malang

Variabel	Coefficient	Prob	
PEND	0.004432	0.4079	
KESH	0.005537	0.0404	
INFR	0.001958	0.3006	
C	6.012180	0.0000	
R squared	0.980417	F-statistic	280.3580
Adjusted R-squared	0.976920	Prob(F-statistic)	0.000000
Formula	$Y = 6.012179 + 0.004432X_1 + 0.005537X_2 + 0.001958X_3 + \mu t$		

Sumber: Data diolah melalui Eviews, 2016

Pengeluaran Pendidikan Kabupaten Malang

Hasil regresi yang dilakukan pada Kabupaten Malang terhadap pengeluaran pendidikan memiliki hasil yaitu berpengaruh positif tidak signifikan. Pada pengeluaran pendidikan Kabupaten Malang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.004432. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang seharusnya pengeluaran pendidikan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suparno (2014). Menurutnya, hal ini karena pemerintah memang sangat memprioritaskan sektor pendidikan. Besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dapat dilihat pada besarnya anggaran pendidikan dan juga semakin banyaknya realisasi program-program pendidikan seperti pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah beasiswa bagi siswa tidak mampu yang juga terus berjalan hingga saat ini, hal tersebut mengurangi anggaran pemerintah untuk kepentingan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi anggaran pendidikan tersebut diharapkan akan berdampak pada ekonomi jangka panjang melalui peran sumber daya manusia yang akan meningkat kedepannya.

Pemerintah Kabupaten Malang harus dapat memastikan bahwa pengeluaran pendidikan dapat terserap dengan baik dengan cara mengalokasikan anggaran tersebut seperti perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah, memberi keringanan biaya bagi keluarga ekonomi lemah dan memberikan beasiswa prestasi.

Pengeluaran Kesehatan Kabupaten Malang

Pada pengeluaran kesehatan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa pengeluaran kesehatan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Peningkatan anggaran kesehatan di Kabupaten Malang sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.005537 persen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang (2011) dimana penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran kesehatan akan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pendidikan di Kabupaten Malang dapat dibilang efektif terhadap pertumbuhan ekonominya. Menurut Wang (2011) menjelaskan bahwa dalam negara-negara dengan tingkat perekonomian menengah sampai tinggi akan memiliki pengaruh pengeluaran kesehatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Malang sendiri dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik sehingga pengaruh pengeluaran kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Malang perlu meningkatkan pembangunan pada bidang kesehatan karena bidang kesehatan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian anggaran bidang kesehatan meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan, dan menambah jumlah tenaga medis. Pelayanan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu perlu ditingkatkan, mengingat fasilitas tersebut merupakan sarana yang langsung dapat dijangkau masyarakat lapisan bawah. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ekonomi lemah dengan tarif yang terjangkau atau dengan memberikan subsidi.

Pengeluaran Infrastruktur Kabupaten Malang

Hasil regresi pengeluaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang memiliki hubungan positif dan tidak signifikan. Peningkatan pengeluaran infrastruktur Kabupaten Malang sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.001958 persen. Hasil pengeluaran infrastruktur yang berpengaruh tidak signifikan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, tetapi dapat dijelaskan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maqin (2011). Pada penelitian tersebut menjelaskan hasil tidak signifikan diduga karena kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat semakin menurun atau tidak memadai, sehingga tidak mampu mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Malang. Pada kondisi jalan di Kabupaten Malang sendiri pada tahun terakhir memang telah dilakukan perbaikan tetapi karena kondisi lalu lintas yang dipenuhi oleh mobil-mobil besar seperti bus dan truk muatan sehingga jalan di Kabupaten Malang sekarang ini mengalami kerusakan lagi sehingga mengurangi mobilitas masyarakat.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Malang masih berjalan dengan baik sampai saat ini tetapi infrastruktur jalan yang semakin hari kualitas jalan tersebut semakin menurun. Banyaknya kendaraan-kendaraan besar seperti truk muatan membuat memperparah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malang. Kerusakan jalan tersebut akan membuat mobilitas masyarakat menurun dan memperlambat perkembangan ekonomi.

Pembahasan Terhadap Kabupaten Jember

Tabel 6. Hasil Regresi Kabupaten Jember

Variabel	Coefficient	Prob	
PEND	0.009554	0.0040	
KESH	-0.006525	0.0246	
INFR	-0.000930	0.0279	
C	6.230676	0.0000	
R squared	0.984102	F-statistic	346.6540
Adjusted R-squared	0.981264	Prob(F-statistic)	0.000000
Formula	$Y = 6.230676 + 0.009554X1 - 0.006525X2 - 0.000930X3 + \mu$		

Pengeluaran Pendidikan Kabupaten Jember

Hasil penelitian terhadap pengeluaran pendidikan di Kabupaten Jember memiliki hubungan positif dan signifikan. Peningkatan anggaran pendidikan di Kabupaten Jember sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.009554 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan di Kabupaten Jember cukup optimal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulaikhah (2012) pengeluaran pendidikan akan berpengaruh positif signifikan atau peningkatan pengeluaran pendidikan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2015) juga menjelaskan bahwa pengeluaran pendidikan akan meningkatkan tingkat pendidikan pada masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat akan memiliki skill untuk bekerja dan menguasai teknologi untuk mendorong perekonomian. Seperti teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Solow-Swan di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal manusia dan tingkat kemajuan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu meningkatkan pembangunan pada bidang pendidikan seperti penambahan dan perbaikan fasilitas pendidikan, menambah tenaga kerja pengajar, dan memberikan keringanan untuk bersekolah bagi keluarga miskin. Karena setiap pemanfaatan pengeluaran pendidikan di Kabupaten Jember akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya dengan berbagai cara misalnya seperti menarik investor atau memanfaatkan peran pariwisata. Dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Jember lebih terserap dan pada akhirnya akan meningkatkan iklim ekonomi di Kabupaten tersebut.

Pengeluaran Kesehatan Kabupaten Jember

Hasil regresi pengeluaran kesehatan di Kabupaten Jember memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten tersebut. Pada Kabupaten Jember, peningkatan anggaran kesehatan sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.006525 persen. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Kabupaten Jember yang berpengaruh negatif dikarenakan pengaruh anggaran pemerintah untuk kesehatan terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi bahwa ternyata anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tidak terlalu tepat diarahkan untuk memperbaiki alokasi kesehatan. Pada penelitian Wang (2011) menjelaskan bahwa dalam negara-negara dengan tingkat perekonomian menengah sampai tinggi akan memiliki pengaruh pengeluaran kesehatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada negara-negara dengan tingkat perekonomian yang rendah akan memiliki hasil yang berbeda. Menurutnya, pengeluaran kesehatan tidak selalu efektif merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya pendapatan masyarakat juga akan mempengaruhi peran fasilitas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pendapatan masyarakat akan membuat masyarakat lebih memilih pengobatan secara tradisional dan juga tingginya anggaran kesehatan membuat biaya-biaya pengobatan di rumah sakit semakin mahal. Sehingga tugas pemerintah Kabupaten Jember adalah memberikan pengarah dan pengertian terhadap pentingnya memanfaatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Jember dan

juga menekan biaya berobat atau memberikan tarif berobat yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah.

Pengeluaran Infrastruktur Kabupaten Jember

Hasil regresi pengeluaran infrastruktur di Kabupaten Jember memiliki hubungan negatif signifikan. Peningkatan pengeluaran infrastruktur di Kabupaten Jember sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.000930 persen. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang seharusnya pengaruh pengeluaran infrastruktur akan memiliki hubungan positif dan signifikan. Tetapi hasil ini menyamai kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suparno (2014). Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran infrastruktur membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan berbagai programnya seperti perbaikan dan penambahan jalan dan juga fasilitas umum, dan fasilitas lainnya sehingga belum mampu memberikan dampak secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur mempunyai masa jangka panjang sehingga akan baru dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Hal ini serupa dengan hasil penelitian di Kabupaten Jember di mana pengeluaran infrastruktur belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut dan seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu jangka panjang untuk merasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

E.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pengeluaran pendidikan, Kabupaten Malang memiliki hubungan pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran pendidikan di Kabupaten Malang masih belum berpengaruh secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun. Sedangkan pada Kabupaten Jember memiliki hubungan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka pengeluaran pendidikan di Kabupaten Jember berpengaruh optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pada pengeluaran kesehatan, Kabupaten Malang memiliki pengeluaran kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang. Pengeluaran kesehatan tersebut juga menunjukkan bahwa anggaran kesehatan cukup optimal dalam sumbangsih terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada pengeluaran kesehatan Kabupaten Jember memiliki pengeluaran kesehatan yang berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa arah penggunaan anggaran yang ada masih belum tepat sasaran melihat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa meskipun pengeluaran kesehatan dinaikkan namun pertumbuhan ekonomi akan menurun.
3. Variabel pengeluaran infrastruktur di Kabupaten Malang memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hal ini dikarenakan pengeluaran infrastruktur masih belum terserap dengan baik. Sedangkan pada Kabupaten Jember berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa anggaran infrastruktur tidak optimal dalam sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pengeluaran infrastruktur untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara langsung. Perlu jangka waktu panjang untuk merasakan manfaat tersebut, Maka dari itu pada Kabupaten Malang memiliki pengaruh yang tidak terlalu tinggi dan pada Kabupaten Jember memiliki pengaruh negatif.

F.SARAN

Pemerintah Kabupaten Malang perlu meningkatkan pembangunan pada bidang kesehatan karena pada bidang kesehatan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian anggaran bidang kesehatan meliputi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan, dan menambah jumlah tenaga medis. Setiap pemanfaatan pengeluaran kesehatan di Kabupaten Malang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut. Sedangkan pada Kabupaten Jember perlu meningkatkan pembangunan pada bidang pendidikan karena pada bidang pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian anggaran bidang pendidikan meliputi penambahan dan perbaikan fasilitas pendidikan, memberikan pelatihan kepada pengajar, dan menambah tenaga kerja pengajar. Setiap pemanfaatan pengeluaran pendidikan di Kabupaten Jember akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut.

Pengalokasian terhadap pengeluaran sektor publik adalah anggaran yang ditujukan kepada masyarakat yang seharusnya lebih tepat sasaran. Pemerintah diharapkan dapat menyusun anggaran sektor publik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya memenuhi kewajiban saja, namun anggaran pembangunan tersebut bisa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan perekonomian daerah dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenor, P. R. 2010. *A theory of infrastructure-led development*. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(5), 932–950. <http://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.01.009>
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Jawa Timur Dalam Angka*. Diakses dari <http://jatim.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Jawa Timur Dalam Angka*. Diakses dari <http://jatim.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Jawa Timur Dalam Angka*. Diakses dari <http://jatim.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Diakses dari <http://jemberkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Diakses dari <http://jemberkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Diakses dari <http://jemberkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Kabupaten Malang Dalam Angka*. Diakses dari <http://malangkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Kabupaten Malang Dalam Angka*. Diakses dari <http://malangkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Kabupaten Malang Dalam Angka*. Diakses dari <http://malangkab.bps.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Beraldo, S., Montolio, D., & Turati, G. 2009. *Healthy, educated and wealthy: A primer on the impact of public and private welfare expenditures on economic growth*. Journal of Socio-Economics, 38(6), 946–956. <http://doi.org/10.1016/j.socec.2009.06.013>

- Boediono. 1988. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). 2004-2014. *Data Keuangan Daerah*. Diakses dari <http://djpk.depkeu.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Durevall, D., & Henrekson, M. 2011. *The futile quest for a grand explanation of long-run government expenditure*. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 708–722. doi:10.1016/j.jpubeco.2011.02.004
- Gujarati. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gupta, M. R., & Barman, T. R. 2010. *Health, infrastructure, environment and endogenous growth*. *Journal of Macroeconomics*, 32(2), 657–673. doi:10.1016/j.jmacro.2009.09.001
- Jhingan, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Tren Realisasi Investasi RI Terus Meningkat*. Diakses dari <http://kemenkeu.go.id> pada tanggal 14 Februari 2015
- Mangkoesebroto, G. 1991. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mariana, D. R. 2015. *Education as a Determinant of the Economic Growth. The Case of Romania*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197(February), 404–412. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.156>
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. 2014. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 61–98.
- Maqin, A. 2011. *Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat*. Bandung: Universitas Pasundan
- Mercan, M., & Sezer, S. 2014. *The Effect of Education Expenditure on Economic Growth: The Case of Turkey*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 925–930. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.565>
- Marginean, I. 2014. *Public Expenditure with Education and Healthcare in EU Countries*. *Procedia Economics and Finance*, 429-435
- Nasution, Z. 1994. *Pengantar Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nasution, Z. 2000. *Komunikasi dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Payaman J, S. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.
- Pramana, G. 2013. *Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(76), 584–598.
- Prasetya, F. 2012a. *Modul Ekonomi Publik Bagian I: Peran Pemerintah*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Prasetya, F. 2012b. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sriyana, J. 2007. *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka*. Yogyakarta: UNISIA, 195–210
- Sugiyanto, C. 2009. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Sukirno, S. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparno, H. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur*. Universitas Mulawarman, 5, 1–22
- Tisniwati, B. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Kualitas Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat*. Universitas Brawijaya.
- Todaro, M. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Wang, K. M. 2011. *Health care expenditure and economic growth: Quantile panel-type analysis*. *Economic Modelling*, 28(4), 1536–1549. <http://doi.org/10.1016/j.econmod.2011.02.008>
- Wijayanto, A. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Universitas Brawijaya.
- Zulaikhah. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau*. Universitas Brawijaya.